

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 12, Desember 2023, Halaman 147-151

Licenced by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10429049)DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10429049>

Analisis Implementasi Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Dairi Terhadap Pelaku UMKM (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Dairi)

Ramadian Maghvira Saragih¹ Nuri Aslami²^{1,2}Manajemen, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, IndonesiaE-mail: saragihdian936@gmail.com¹, nuriaslami@uinsu.ac.id²

Abstrak

Kabupaten Dairi, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, memiliki potensi UMKM yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM di Kabupaten Dairi terdiri dari berbagai sektor, seperti kerajinan tangan, pertanian, perdagangan, dan sektor lainnya, yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam upaya mendukung UMKM, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi di Kabupaten Dairi memiliki peran penting. Dinas ini bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan sektor perdagangan, perindustrian, dan koperasi dalam wilayahnya. Tugas dan tanggung jawab Dinas ini mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan pasar, pelatihan, bantuan teknis, pengaturan perizinan, dan regulasi terkait UMKM. Namun, meskipun Dinas ini memiliki peran yang jelas dalam mendukung UMKM, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Dairi. Tantangan ini dapat berkaitan dengan akses ke pasar, perizinan, pembiayaan, dan berbagai faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan tidak menghasilkan data statistik atau pengukuran dalam suatu penelitian.

Kata Kunci: *Ekonomi, Industri, UMKM, Implementasi*

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 22 December 2023

PENDAHULUAN

Kabupaten Dairi, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, memiliki potensi UMKM yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM di Kabupaten Dairi terdiri dari berbagai sektor, seperti kerajinan tangan, pertanian, perdagangan, dan sektor lainnya, yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi lokal (Sidauruk, 2018). Dalam upaya mendukung UMKM, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi di Kabupaten Dairi memiliki peran penting. Dinas ini bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan sektor perdagangan, perindustrian, dan koperasi dalam wilayahnya. Tugas dan tanggung jawab Dinas ini mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan pasar, pelatihan, bantuan teknis, pengaturan perizinan, dan regulasi terkait UMKM. Namun, meskipun Dinas ini memiliki peran yang jelas dalam mendukung UMKM, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Dairi. Tantangan ini dapat berkaitan dengan akses ke pasar, perizinan, pembiayaan, dan berbagai faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan UMKM (Antika, 2017).

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terkait implementasi peran, tugas, dan tanggung jawab Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi di Kabupaten Dairi terhadap pelaku UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang sejauh mana Dinas tersebut telah berkontribusi pada perkembangan UMKM dan mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan keberlanjutan UMKM dalam konteks Kabupaten Dairi.

KAJIAN TEORI

Untuk analisis implementasi peran, tugas, dan tanggung jawab Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi di Kabupaten Dairi terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mencakup berbagai aspek yang mencakup, tentang peran pemerintah daerah dalam

mendukung pengembangan ekonomi lokal, khususnya sektor UMKM (Ongku, 2018). Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi dianggap sebagai agen penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di tingkat kabupaten. Menjelaskan prinsip-prinsip dan strategi yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, seperti akses ke pasar, pembiayaan, pelatihan, dan bimbingan. Ini dapat melibatkan teori klaster industri dan jaringan bisnis (Umasugi, 2012). Menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan perumusan kebijakan publik untuk mendukung UMKM, seperti insentif pajak, pinjaman rendah bunga, dan program pelatihan. Merinci teori tentang bagaimana lembaga pemerintah, seperti Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, berfungsi dalam menerapkan kebijakan dan program. Hal ini mencakup tugas, struktur organisasi, dan peran pegawai (Setiawan, 2020). Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi juga dapat berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi UMKM, lembaga keuangan, dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan bersama. Dan terakhir, evaluasi kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi dilakukan dalam konteks mendukung UMKM. Ini melibatkan pengukuran dampak program-program yang telah diimplementasikan (Indah Permata Sari, 2023). Kajian teori ini akan memberikan kerangka kerja yang kuat untuk analisis implementasi peran dan tanggung jawab Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi dalam mendukung UMKM di Kabupaten Dairi serta membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang telah dijalankan.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal, Khususnya Sektor UMKM

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal, terutama dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam upaya ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM serta mendukung ekonomi lokal secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa peran utama pemerintah daerah dalam konteks ini (Windusancono, 2021) :

1. Pemberian Regulasi dan Lisensi. Pemerintah daerah dapat memberikan regulasi yang jelas dan mendukung bagi UMKM dalam hal izin usaha, perizinan, dan peraturan lingkungan. Hal ini akan membantu UMKM untuk beroperasi dengan lebih lancar dan legal.
2. Pelatihan dan Pendidikan. Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan bagi para pelaku UMKM, baik dalam hal manajemen usaha, pemasaran, atau pengembangan keterampilan teknis. Ini akan membantu UMKM untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas mereka.
3. Akses ke Sumber Daya Keuangan. Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan lokal untuk memastikan UMKM memiliki akses yang memadai ke sumber daya keuangan, seperti pinjaman dan kredit dengan suku bunga yang terjangkau.
4. Promosi dan Pemasaran. Pemerintah daerah dapat membantu UMKM dalam upaya promosi dan pemasaran produk lokal melalui kampanye promosi, pameran, atau dukungan dalam menciptakan merek dan kemasan yang menarik.
5. Fasilitas Infrastruktur. Pemerintah daerah dapat menginvestasikan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung UMKM, seperti pusat bisnis, ruang kerja bersama, atau jaringan logistik yang efisien.
6. Pemberian Insentif dan Subsidi. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif pajak, bantuan keuangan, atau subsidi bagi UMKM untuk mendorong investasi dan pertumbuhan bisnis.
7. Pemberdayaan Jaringan Bisnis. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan jaringan bisnis, asosiasi, atau koperasi yang memungkinkan UMKM untuk berkolaborasi, berbagi sumber daya, dan meningkatkan daya tawar mereka di pasar.
8. Pemberian Dukungan Teknis. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan teknis dan konsultasi bagi UMKM dalam hal perencanaan strategis, manajemen operasional, dan inovasi produk atau layanan.
9. Monitoring dan Evaluasi. Pemerintah daerah perlu memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang telah mereka implementasikan, dan melakukan perubahan jika diperlukan untuk meningkatkan dukungan kepada UMKM.

Melalui peran-peran ini, pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam

memajukan ekonomi lokal dengan memperkuat sektor UMKM, yang sering kali menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Dengan dukungan yang baik, UMKM dapat tumbuh dan berkembang, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tugas, Struktur Organisasi, dan Peran Pegawai

Fungsi lembaga pemerintah seperti Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi dalam menerapkan kebijakan dan program seringkali dibentuk berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Struktur organisasi lembaga pemerintah ini biasanya mencakup beberapa divisi atau departemen yang fokus pada bidang-bidang khusus, seperti perdagangan internasional, promosi industri, pengaturan koperasi, dan pembiayaan UMKM. Struktur organisasi ini bisa berbeda di setiap negara atau wilayah, dan bisa mencakup direktur, kepala departemen, manajer program, analis kebijakan, dan staf administrasi (SUBAGYO & PURNOMO, 2022).

Pegawai lembaga ini harus memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi lokal, tren industri, dan masalah yang dihadapi oleh UMKM. Mereka juga perlu bekerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal seperti asosiasi industri, kelompok UMKM, dan masyarakat bisnis untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan sektor tersebut.

Selain itu, lembaga-lembaga ini harus transparan dan bertanggung jawab, serta memiliki mekanisme untuk mengukur keberhasilan dan dampak kebijakan dan program yang mereka jalankan. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sasaran dan tujuan yang ditetapkan tercapai. Penting untuk dicatat bahwa peran dan tugas lembaga pemerintah seperti Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi menjadi faktor penting dalam menjalankan peran mereka dalam mendukung UMKM dan sektor ekonomi terkait lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan tidak menghasilkan data statistik atau pengukuran dalam suatu penelitian (Ramdhan, 2021). Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk penelitian sosial. Dimana proses penelitian tersebut mampu menghasilkan uraian dalam bentuk tulisan, ucapan atau perilaku orang yang diamati baik dari (individu, kelompok, dan atau masyarakat), organisasi tertentu dan lain-lain (Rukin, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi peran, tugas, dan tanggung jawab Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi di Kabupaten Dairi terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memerlukan pemahaman mendalam tentang sejauh mana lembaga tersebut telah mampu mendukung perkembangan UMKM. Pembahasan mengenai hal ini Dinas terkait memiliki peran utama dalam memfasilitasi dan mendorong perkembangan UMKM di Kabupaten Dairi. Mereka bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, program, dan strategi yang relevan untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM. Dinas ini bertugas merancang, mengimplementasikan, dan memantau program dan kebijakan yang ditujukan kepada pelaku UMKM. Ini melibatkan berbagai aspek, seperti pendampingan, akses ke modal, pelatihan, pemasaran, dan perizinan usaha. Dalam konteks analisis implementasi, penting untuk mengevaluasi kebijakan yang telah dirumuskan oleh Dinas tersebut. Bagaimana kebijakan ini mendukung pelaku UMKM, dan sejauh mana mereka sesuai dengan kebutuhan UMKM di Kabupaten Dairi. Selanjutnya Dinas ini harus memiliki program-program konkret yang mendukung UMKM. Penting untuk menilai sejauh mana program-program ini berhasil mencapai tujuan mereka dan sejauh mana pelaku UMKM mengambil manfaat dari program tersebut. Salah satu peran penting Dinas adalah membantu UMKM dalam akses ke pasar lokal dan mungkin juga pasar nasional dan internasional. Penting juga untuk mengevaluasi sejauh mana Dinas memberikan bimbingan dan pelatihan yang diperlukan kepada pelaku UMKM. Ini bisa berupa pelatihan keterampilan, manajemen bisnis, atau pelatihan teknis sesuai sektor.

Dengan melakukan analisis implementasi yang komprehensif, dapat dipahami sejauh mana Dinas

Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi telah berhasil dalam memenuhi peran, tugas, dan tanggung jawab mereka terhadap pelaku UMKM, serta daerah mana yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan dampak positifnya pada sektor UMKM.

Peran Dinas Terkait Dalam Memberikan Dukungan Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kabupaten Dairi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menyatakan bahwa, “Pengawasan dan Pengendalian yang sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri”. Pada pembahasan ini dapat penulis simpulkan bahwa pada implementasi perkembangan keberpihakan dinas terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah pada dinas perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM di kabupaten Dairi memiliki peranan yang berbeda-beda pada setiap bidang. Untuk bidang Koperasi dan UKM memiliki peran sebagai pihak pelaksana yang menindak lanjuti tugas yang telah sesuai dengan peraturan-peraturan dari kementerian koperasi dan usaha kecil menengah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dalam memberikan sanksi menonaktifkan koperasi-koperasi yang tidak sesuai dan tidak memiliki nomor induk koperasi (NIK) dan berperan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada koperasi-koperasi yang tidak memberikan laporan triwulan dalam waktu dua tahun berjalan maka koperasi tersebut dapat langsung dinonaktifkan. Untuk bidang Perdagangan memiliki peranan sebagai pihak pelaksana dalam melakukan pengawasan terkait barang-barang beredar dilingkungan perdagangan di kabupaten Dairi sebagai pihak pelaksana bidang perdagangan akan melakukan pengawasan kepada barang-barang yang inport maupun eksport dan melihat apakah barang edaran tersebut sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI ataupun memastikan barang edaran tidak kadaluwarsa. Sedangkan untuk Bidang Perindustrian memiliki peranan sebagai pihak pelaksana yang bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai bagaimana cara dalam melakukan pengembangan serta mengelola terkait dengan barang atau produk yang akan diedarkan atau diperjual belikan. Dari kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa setiap bidang pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Dairi memiliki peranan yang berbeda-beda dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Kabupaten Dairi.

Manajemen Pengawasan yang diberikan oleh Dinas terkait dalam melayani pelaku usaha Mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Dairi

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana manajemen pengawasan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Dairi terkait pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kabupaten Dairi. Untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana manajemen pengawasan yang diberikan kepada pelaku usaha penulis menggunakan teori Fitrianingrum (2015:148) pengawasan memiliki beberapa indikator, yaitu:

- a. Kesesuaian pengawasan dengan rencana
- b. Kesesuaian pengawasan dengan pimpinan dan pegawainya
- c. Penyimpangan dalam pengawasan
- d. Objektivitas pengawasan
- e. Fleksibilitas pengawasan
- f. Hemat dalam pengawasan
- g. Mengadakan tindakan perbaikan

SIMPULAN

Analisis Implementasi peran, tugas, dan tanggung jawab Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi di Kabupaten Dairi terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memerlukan pemahaman mendalam tentang sejauh mana lembaga tersebut telah mampu mendukung perkembangan UMKM. Dengan melakukan analisis implementasi yang komprehensif, dapat dipahami sejauh mana Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi telah berhasil dalam memenuhi peran, tugas, dan tanggung jawab mereka terhadap pelaku UMKM, serta daerah mana yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan dampak positifnya pada sektor UMKM

SARAN

Diharapkan dengan ini Dinas terkait yaitu, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Dairi memiliki peran utama dalam memfasilitasi dan mendorong perkembangan UMKM di Kabupaten Dairi. Mereka juga harus bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, program, dan strategi yang relevan untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM.

REFERENSI

- Antika, M. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang.
- Indah Permata Sari, K. M. (2023). Analisa Kebijakan Publik terhadap UMKM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 552-559.
- Ongku, M. (2018). Implementasi Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
- Putra, I. J. (2023). Strategi Ketahanan Untuk Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Perspektif Syariah di Kota Solok. *urnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. Setiawan, H. C. (2020). *Manajemen Industri Kreatif: Teori dan Aplikasi*. PT. Berkas Mukmin Mandiri.
- Sidauruk, R. (2018). Ekonomi Kreatif sebagai Basis City Branding menuju Kepariwisata Terintegrasi di Kawasan Danau Toba (Creative Economy as Basis of City Branding Toward Integrated Tourism in Toba Lake Zone). *Inovasi*, 83- 104.
- SUBAGYO, S., & PURNOMO, H. (2022). *Manajemen UMKM*.
- Umasugi, L. (2012). Pendekatan dinamis dalam pengembangan UKM di Kota Ternate. *Jurnal Agribisnis Perikanan*, 15-23.
- Windusancono, B. A. (2021). "Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Indonesia. *Mimbar administrasi* , 01-14.
- Suryadi, A. (2021). "Pembinaan UMKM: Peran dan Tantangan." Penerbit Mandiri Jaya. *Jurnal Pengembangan Daerah*, 20(1), 30-45.
- Nurani, S. (2022). "Pengembangan UMKM Pasca 2020." Penerbit Maju Jaya. Santoso, B. (2021). "Peran Koperasi dalam Pemberdayaan UMKM." Pustaka Mandiri.
- Kusuma, I. (2023). "Jaringan UMKM dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Mikro*, 15(2), 45-60.
- Simamora, B. (2015). "Pengaruh Kebijakan Dinas Perindustrian terhadap Pertumbuhan UMKM." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Utama, I. W. (2018). "Peran Koperasi dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM: Studi Kasus di Kabupaten XYZ." *Jurnal Koperasi dan UKM*.
- Siregar, M. (2013). "Dampak Kebijakan Perdagangan Terhadap Peningkatan Akses Pasar Bagi UMKM." *Jurnal Perdagangan Global*.
- Umar, I., Sunarsih, S., & Zain, D. (2021). Implementasi Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab Dinas terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM di Kota Singkawang. *Eksos*, 17(1), 49-61.
- INDONESIA, P. R. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- Simbolon, A. P. G. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Mikro Pada Kantor Camat Lae Parira Kabupaten Dairi.
- Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi penelitian. *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*. Azfaiman, A. (2018). *Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Memberikan Bantuan Modal Usaha Jenis Sagu Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah* (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintahan).
- Putra, I. J. (2023). Strategi Ketahanan Untuk Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Perspektif Syariah di Kota Solok. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*,
- Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Indonesia. *Mimbar administrasi*, 18(1), 01-14.